

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah masalah terbesar dalam pembangunan negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Seseorang dapat dikatakan miskin apabila dia belum mampu mencukupi kebutuhan hidupnya seperti kebutuhan dasar yakni sandang, pangan dan papan.

Kemiskinan adalah penduduk yang hidup dalam keadaan kurang nutrisi dan kesehatan yang buruk, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, hidup di wilayah-wilayah yang memiliki lingkungan buruk, dan memperoleh penghasilan yang rendah (Todaro dan Smith, 2006). Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu..

Kemiskinan merupakan masalah mendasar yang kerap muncul di negara-negara yang sedang berkembang maupun di negara miskin. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat menikmati standar kesehatan, standar pendidikan dan standar kehidupan yang layak. Di Indonesia kemiskinan menjadi isu yang sangat hangat hingga saat ini, belum ada yang bisa menghilangkan isu kemiskinan yang ada di Indonesia (Amalia, 2012).

Menurut Maipita (2014), Kemiskinan timbul dikarenakan adanya perbedaan kemampuan, kesempatan dan pendapatan. Kemiskinan juga menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan bagi orang miskin untuk melaksanakan

kegiatan, seperti tidak mendapat akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, kemiskinan banyak terdapat di daerah terisolir dan pedalaman yang jauh dari pusat pemerintahan. Penduduk yang miskin di pedalaman dikarenakan ketertinggalan dari berbagai aspek seperti, untuk melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan, untuk mendapat pengobatan, dan untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya yang disebabkan dari dirinya sendiri, keturunan, dan ada juga dari luar seperti lingkungan hidup, dan pemerintah.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain seperti tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaannya dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Suryawati, 2005).

Menurut BPS (2016) kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pengeluaran. Ukuran kemiskinan yaitu menggunakan garis kemiskinan yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran yang dihasilkan dari nilai kebutuhan minimum makanan yang dihitung dalam 2.100 kilokalori perkapita perhari, sedangkan garis kemiskinan non makanan dihitung dari kebutuhan minimum untuk sandang, pendidikan, dan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

Permasalahan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu masih tingginya angka kemiskinan jika dibandingkan dengan provinsi lain di

Indonesia. Oleh sebab itu kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama terutama bagi pemerintah provinsi sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan untuk segera mencari jalan keluar sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Adapun data jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Presentase Penduduk Miskin di
Provinsi Nusa Tenggara Timur (Persen)

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (%)
2016	22.19
2017	21.85
2018	21.35
2019	21.09
2020	20.90

Sumber Data: BPS NTT 2021

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan bahwa presentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 5 tahun terakhir mengalami penurunan angka kemiskinan yang dimana pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin 22.19 % dan terus menurun hingga pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi 20.90%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan:

Penyebab kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor menurut Hermawati,dkk (2015):

1. Kurangnya kesempatan (*lack of opportunity*)
2. Rendahnya kemampuan (*low self capability*)
3. Kurangnya jaminan (*low level of security*)

Ketiga penyebab kemiskinan diatas bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vacious circle of poverty*). Yang dimaksud lingkaran kemiskinan

adalah suatu lingkaran, suatu rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain secara demikian rupa, sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, baik investasi manusia maupun investasi kapital. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya.

Penyebab yang lain adalah masyarakat miskin belum mampu menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi. Gizi buruk masih terjadi di lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia dan yatim piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh dari memadai.

Menurut Sukirno (2012 : 327) Pengangguran merupakan suatu masalah yang sering melanda kegiatan perekonomian suatu negara. Pengangguran adalah kondisi dimana seseorang sedang mencari pekerjaan tetapi belum mendapat pekerjaan. Hal ini akan menimbulkan dampak-dampak negatif apabila tingkat pengangguran semakin tinggi. Dampak dari pengangguran tersebut sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Jika pengangguran

tidak di tanggulangi akan menyebabkan semakin meningkatnya angka kemiskinan di suatu daerah.

Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung. Bagi kebanyakan orang kehilangan suatu pekerjaan merupakan penurunan suatu standar kehidupan. Jadi tidak mengejutkan apabila pengangguran menjadi topik yang sering diperbincangkan dalam perdebatan politik oleh para politisi yang seringkali mengkaji bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu terciptanya lapangan pekerjaan (Mankiw, 2000).

Menurut Sukirno (1994), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat. Pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan tersebut akan diperoleh apabila pengusaha tersebut dapat menjual barang dan jasa yang mereka produksi. Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan menambah penggunaan tenaga kerja.

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki

pekerjaan namun belum memulai pekerjaan. Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya.

Permasalahan serius di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi penyebab kemiskinan yaitu masih tingginya angka pengangguran jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Oleh sebab itu pengangguran menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi pemerintah provinsi sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan untuk segera mencari jalan keluar sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Adapun data jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat dari tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Persen)

Tahun	Jumlah Pengangguran Terbuka %
2016	3,25
2017	3,27
2018	3,01
2019	3,55
2020	4,28

Sumber Data: BPS NTT 2021

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang dimana pada tahun 2016 jumlah pengangguran terbuka 3.25 % dan meningkat sampai pada tahun 2017 jumlah pengangguran terbuka menjadi 3.27% kemudian menurun kembali pada tahun 2018 menjadi 3.01 dan pada tahun 2019 jumlah pengangguran terbuka kembali meningkat menjadi 3.55 % dan terus meningkat menjadi 4.28 % pada tahun 2020.

Faktor yang menyebabkan pengangguran:

Menurut Afrida (2003 : 134), pada dasarnya orang mengatakan bahwa penyebab dari pengangguran adalah ketidakseimbangannya antara penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja. Adapun penyebab lainnya yaitu:

1. Masyarakat atau warga tidak memiliki keterampilan serta tingkat pendidikan yang rendah
2. Adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia
3. Tenaga kerja yang ada di daerah dengan kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang
4. Pemerintah memberhentikan kebijakan mengirimkan tenaga kerja atau TKI ke luar negeri
5. Harapan terlalu tinggi untuk tenaga kerja
6. PHK

Upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya. Persoalan pengangguran dan kemiskinan sudah menjadi persoalan yang sangat serius sehingga belum ditemukannya tanda akan berakhir permasalahan kemiskinan. Pengangguran merupakan kondisi dimana seseorang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya, dimana kemiskinan merupakan kondisi seseorang tidak dapat menikmati kebutuhan dasarnya.

Menurut Todaro (2000), pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk kemampuan suatu negara. Pendidikan akan mencerminkan kualitas dari

sumber daya manusia dari suatu negara ataupun daerah. Pendidikan merupakan suatu metode yang digunakan untuk menyerap pengetahuan mengenai teknologi modern. Pendidikan juga merupakan suatu alat dan jembatan yang digunakan sebagai pengembangan kapasitas agar tercipta suatu pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu Pendidikan juga memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga selain bisa memperoleh pekerjaan yang layak dengan gaji atau upah yang sesuai, tingginya tingkat pendidikan juga mencerminkan taraf intelektualitas suatu masyarakat.

Tabel 1.3
Rata –rata Lama Sekolah Penduduk
Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Persen)

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk NTT (%)
2016	7,02
2017	7,15
2018	7,30
2019	7,55
2020	7,63

Sumber Data :BPS NTT 2021

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berjumlah 7.02% dan terus meningkat hingga 7.63% pada tahun 2020.

Berdasarkan uraian di atas,penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan referensi dalam penelitian.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memberi informasi untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.
3. Bagi Pemerintah, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk menanggulangi angka pengangguran dan pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.